

**KEJAYAAN KESULTANAN BUTON ABAD KE-17 & 18 DALAM
TINJAUAN ARKEOLOGI EKOLOGI**
***The Glorious Buton Sultanate 17 & 18th Century in Ecological
Archaeology Review***

Muhammad Al Mujabuddawat
 Balai Arkeologi Ambon-Indonesia
 Jl. Namalatu-Latuhalat, Ambon 97118
 mujab@kemdikbud.go.id

Naskah diterima: 23-02-2015; direvisi: 17-04-2015; disetujui: 25-05-2015

Abstract

Buton Sultanate is a prosperous maritime sultanate in its heyday. Buton Sultanate land is not very fertile and does not produce a lot of commodities, but it is quite well known because of its location in the commercial lines, so that it becomes a stopover place for passing ships. This paper provides an overview of ecological archaeology towards the triumph case of Buton Sultanate in the 17th-18th century. The research method used in this paper is literature study and review of a theory through an observation of cultural ecology and environmental determinism. The results show that the ecological aspects affect the heyday of the Buton Sultanate. Buton Sultanate does not produce a lot of major commodities, but it is successfully adapt to environmental conditions and maximize the benefits derived from the ecological aspects by applying it to the structure of Sultanate society, a commercial network, and material culture. The profits are also applied to maintain its legitimacy in the great power of hegemony in the region. Success in 'conquering' the environment makes the Buton Sultanate victorious, even the identity of 'kebutonan' still embedded in Buton society until this day.

Keywords: Ecological archaeology, Buton, environment, sultanate, trade

Abstrak

Kesultanan Buton merupakan kesultanan bercorak maritim yang cukup besar pada masa jayanya. Daratan Kesultanan Buton tidak begitu subur dan tidak banyak menghasilkan komoditi namun cukup terkenal karena lokasinya terletak di jalur niaga, sehingga menjadi lokasi singgah bagi kapal-kapal yang melintas. Penelitian ini berisi tinjauan arkeologi ekologi terhadap kasus kejayaan kesultanan Buton abad ke-17-18. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dan tinjauan teori melalui tinjauan model cultural ecology dan environmental determinism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek ekologi berpengaruh terhadap kejayaan Kesultanan Buton. Kesultanan Buton tidak banyak menghasilkan komoditi utama, namun berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya dan sukses memaksimalkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari aspek ekologis. Dengan menerapkannya pada struktur masyarakat Kesultanan, jaringan perniagaan, budaya material, Kesultanan Buton mempertahankan legitimasi dalam hegemoni kekuatan besar di wilayahnya. Kesuksesan dalam ‘menaklukan’ lingkungan menjadikan Kesultanan Buton berjaya, bahkan hingga saat ini identitas ‘kebutonan’ masih melekat di dalam masyarakat Buton.

Kata kunci: Arkeologi ekologi, Buton, lingkungan, kesultanan, niaga

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan sangat berperan dalam mempengaruhi cara manusia beraktivitas, sehingga manusia dapat menghasilkan sesuatu. Begitu pula sebaliknya, manusia yang selalu tergantung pada lingkungannya dapat mempengaruhi keberadaan dan keseimbangan ekosistem di dalam lingkungan tempat tinggalnya. Suatu ekosistem terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Organisme di dalam suatu komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem dalam ekosistemnya dengan membentuk suatu siklus atau aliran energi, sehingga terbentuk suatu model ekosistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik dan pada perkembangan selanjutnya organisme pun mempengaruhi lingkungan fisik sebagai akibat usaha organisme untuk mempertahankan hidup (Todum, 1992: 17).

Manusia yang termasuk organisme penyusun komponen biotik dalam suatu ekosistem berperan besar dalam keseimbangan model ekosistem. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling khas dibandingkan dengan organisme lainnya sehingga mampu mengubah susunan model ekosistem sebagai bentuk pengaplikasian fungsi akal pikirannya (Sue, 1972: 47). Pada dasarnya, manusia memodifikasi lingkungan sebagai usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan memodifikasi lingkungan tersebut kemudian tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan. Pengaruh lingkungan dapat diamati dari usaha manusia untuk membangun kebudayaan yang disesuaikan dengan keadaan alam dan ketersediaan ekosistem sekitarnya (Sopher, 1967: 1). Interaksi antara keduanya menjadi sangat penting dalam munculnya suatu kebudayaan. Proses adaptasi terhadap lingkungan melahirkan ciri kebudayaan, dan kebudayaan menjadi media untuk menghasilkan ekonomi. Lingkungan pantai sebagai tempat pemberhentian dan tempat

penyebrangan menjadi suatu lokasi bagi pertemuan budaya. Proses dialog, berdagang, melihat, meniru, dan sebagainya dilakukan di pantai yang menjadi pusat perdagangan, laut sebagai faktor integratif atau *continuum* kepulauan Nusantara (Lapien, 2009: 31).

Posisi wilayah Nusantara terletak sangat strategis berada di persimpangan dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan Australia, serta samudera Hindia dan samudera Pasifik menjadi tempat persimpangan kapal-kapal untuk berdagang. Bentuk wilayah Nusantara yang berupa kepulauan menjadikan laut, selat, dan sungai yang saling terhubung membentuk jalur pelayaran dan perdagangan yang ramai. Jalur pelayaran dan perdagangan menjadi sistem yang saling terkait dan menopang sehingga menimbulkan suatu kesamaan budaya meskipun tetap terdapat perbedaan suku bangsa dan bahasa. Kesamaan iklim dan kesatuan geografis juga menjadi faktor penting dalam membentuk suatu pola tertentu dalam kebiasaan makan dan kehidupan lainnya. Secara luas keterkaitan ini tidak hanya dalam kesatuan Nusantara tetapi juga kesatuan kawasan asia Tenggara (Reid, 1992: 16). Selain itu, Nusantara juga terhubung secara langsung maupun tidak langsung dengan dua jalur perdagangan internasional di Asia yang disebut jalur sutera. Jalur pertama adalah jalur darat yang dimulai dari Tiongkok. Jalur kedua adalah jalur laut yang dimulai dari Tiongkok dan Nusantara melalui Selat Malaka ke India hingga pada akhirnya sampai ke Laut Tengah (Van Leur, 1957: 40).

Kawasan Indonesia bagian timur terdapat pelabuhan-pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang yang kemudian membentuk jaringan pelayaran dari dan menuju Sulawesi, seperti Pelabuhan Malaka, Makassar, Sulu, dan Maluku. Kawasan Indonesia bagian barat juga terdapat kota-kota pelabuhan yang ramai, yaitu Batavia, Banten, Demak, dan Surabaya. Menguatnya pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara seiring berjalan dengan jatuhnya satu-persatu pelabuhan tersebut ke tangan VOC dan Portugis. Jatuhnya

Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 menyebabkan para pedagang dan pelaut mencari koloni dagang baru, salah satunya adalah Makassar. Kemudian pada abad ke-17 ketika banyak pelabuhan-pelabuhan di jawa dan Maluku jatuh ke tangan VOC, para pedagang Jawa dan pedagang dari pusat perdagangan tersebut menjadikan kawasan Sulawesi bagian selatan tempat singgah dan pemasaran baru (Poelinggomang, 2002: 22). Politik monopoli yang dijalankan Kolonialis mengakibatkan para pedagang memindahkan tujuan dagangnya mencari tempat-tempat pelabuhan bebas, sehingga peran dari pelabuhan Makassar dan Buton pun semakin meningkat.

Kesultanan Buton merupakan kesultanan bercorak maritim yang terdiri atas banyak pulau, ragam suku dan bahasa. Wilayah Kesultanan Buton berada di tengah-tengah kekuatan besar, yaitu Makassar, Ternate, dan Belanda. Kesultanan ini tetap dapat mempertahankan legitimasinya hingga mencapai kejayaan, meskipun dengan tekanan dua kondisi tersebut. Kejayaan Kesultanan Buton sangat dipengaruhi oleh keberadaan pelabuhan. Pelabuhan Buton merupakan pelabuhan yang sangat penting pada masa itu. Akses laut yang terbentang di nusantara menjadikan Pelabuhan Buton menjadi pelabuhan yang sangat penting untuk disinggahi. Munculnya jalur perdagangan telah memicu terjalinnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan, dengan kota-kota bandarnya sejak abad ke 13-18 M (Tjandrasamita, 2009: 39). Karena faktor tersebut, kesultanan Buton menjadi pusat perdagangan dari kapal-kapal pedagang yang singgah. Perputaran ekonomi yang terjadi turut menjadikan Kesultanan Buton menjadi wilayah kesultanan yang tumbuh besar hingga mencapai masa kejayaannya.

Pembahasan mengenai sejarah kejayaan Kesultanan Buton sejauh ini sudah banyak ditulis. Anthony Reid dalam beberapa tulisannya cukup banyak menjelaskan peran dan kejayaan Kesultanan Buton dalam jaringan

niaga, begitu pun di dalam buku Edward L. Poelinggomang yang berjudul 'Makassar Abad XIX,' serta pembahasan di dalam tulisan yang ditulis oleh Sejarawan lainnya. Pembahasan yang lebih khusus tentang Kesultanan Buton ialah Susanto Zuhdi dalam bukunya yang berjudul 'Sejarah Buton yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana.' Zuhdi dalam bukunya sangat detil menuliskan sejarah Kesultanan Buton hingga aspek budaya masyarakatnya, namun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejayaannya perlu pembahasan lebih lanjut, terutama secara arkeologis. Melihat bagaimana Kesultanan Buton yang terdiri atas banyak pulau, ragam suku dan bahasa bisa menjadi akses penting dalam jalur niaga hingga mencapai masa jayanya sangat menarik untuk dibahas. Arkeologi sebagai ilmu yang menganalisis dan merekonstruksi kejadian masa lampau memiliki peranan dengan sejumlah teori dan metode untuk menganalisis pertanyaan tersebut. Penelitian ini bermaksud meninjau teori arkeologi dalam kasus kejayaan Kesultanan Buton. Pada tulisan ini, teori yang berkenaan dengan aspek-aspek ekologis menjadi pilihan karena manusia sebagai pencipta kebudayaan merupakan sebuah mekanisme yang adaptif terhadap alam, dan alam turut menentukan pola manusia dalam beradaptasi (Sutton & Anderson, 2010: 1), jadi dapat dikatakan bahwa faktor ekologi merupakan sebuah dasar dari perkembangan budaya. Tulisan ini akan menggunakan sudut pandang dari tinjauan arkeologi ekologi untuk membahas aspek-aspek yang menjadi pendorong kemajuan kesultanan Buton hingga mencapai kejayaannya.

METODE

Cakupan penelitian ini berfokus pada wilayah Kesultanan Buton yang mencakup pulau Buton dan pulau-pulau lainnya yang termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Buton pada masa kejayaannya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Data-data yang dikumpulkan berupa sumber literatur yang

berkaitan dengan penelitian kesultanan Buton yang dipilih sesuai tema yang dibahas di dalam tulisan ini. Dalam merumuskan pembahasan dari pertanyaan tulisan ini, tinjauan model arkeologi ekologi menjadi metode yang digunakan. Arkeologi ekologi dalam metodenya menggunakan beberapa konsep model analisa. Model dari arkeologi ekologi diantaranya, *environmental determinism, possibilism model, cultural ecology model, ecosystem model, decism making model, dan general system model* (Butzer, 1994: 32). Pada tulisan ini akan menggunakan tinjauan *environmental determinism model* dan *cultural ecology model* untuk menjawab konteks kejayaan kesultanan Buton berdasarkan model arkeologi ekologi. Pada *environmental determinism model*, faktor yang berpengaruh terhadap penunjang kemakmuran suatu masyarakat di suatu wilayah adalah kondisi geografis dan lingkungan, sedangkan pada *cultural ecology model*, kondisi-kondisi yang ditinjau dari *environmental determinism model* merupakan pendorong utama yang berpengaruh dalam memodifikasi lingkungan sehingga melahirkan budaya materi maupun non materi serta pola pikir masyarakat tersebut. Aspek-aspek yang mendukung kejayaan Kesultanan Buton amat berkaitan dengan faktor ekologis, maka dengan melakukan tinjauan model arkeologi ekologi secara komprehensif terhadap data-data sejarah yang telah tertulis dan diteliti sebelumnya akan mendapatkan pembahasan yang menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan Kesultanan Buton begitu besar dan jaya pada masanya.

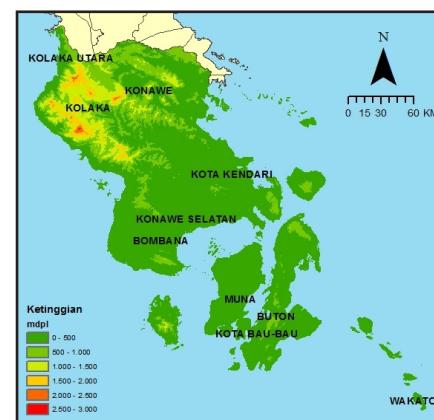
HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel (1834 - 1914) (Hutagalung, 2010: 20). Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Kunci dari ekologi adalah adaptasi, sedangkan adaptasi merupakan kunci dari kebudayaan yang

merupakan dasar kajian dari ilmu arkeologi. Inti dari kebudayaan ialah hasil adaptasi manusia terhadap lingkungan. Arkeologi ekologi secara konsep sangat berkaitan dengan sejarah geografi dan determinisme lingkungan. Determinisme lingkungan adalah keyakinan bahwa lingkungan terutama faktor fisik seperti bentang alam atau iklim menentukan pola budaya manusia dan pembangunan masyarakat. Para determinis lingkungan mengemukakan bahwa hanya faktor-faktor lingkungan, iklim, dan geografis saja yang berdampak pada budaya manusia dan keputusan individu, sedangkan kondisi sosial hampir tidak memiliki dampak pada perkembangan budaya.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tulisan ini menggunakan dua model analisis arkeologi ekologi, yaitu *Environmental Determinism Model* dan *Cultural Ecology Model*. Analisis dan interpretasi tinjauan Environmental Determinism Model dilakukan terhadap Struktur Masyarakat Kesultanan dan Jaringan Perdagangan Kesultanan Buton. Tinjauan *Cultural Ecology Model* dilakukan terhadap Budaya Material Kesultanan Buton, dan Hegemoni Kesultanan. Padabagian ini dibahas lima hal pokok, yaitu Kondisi Lingkungan, Struktur Masyarakat dan Kesultanan, Jaringan Perdagangan, Budaya Material, dan Hegemoni Kesultanan Buton.

1. Kondisi Lingkungan Kesultanan Buton



Gambar 1. Peta Wilayah Buton
(Sumber: Map Extraction peta dasar BIG diolah oleh Mujabuddawat, 2015)

Kesultanan Buton pada masanya terletak di jazirah Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan Kesultanan Buton berada di Kota Baubau, tepatnya di Kecamatan Betoambari merupakan tempat Keraton Buton berdiri. Keraton Buton merupakan wilayah bekas Kesultanan yang secara geografis terletak antara $5, 21^{\circ} - 5, 30$ LS dan $122, 30^{\circ} - 122, 45^{\circ}$ BT. Kondisi lingkungan Pulau Buton berbentuk perbukitan dengan struktur tanah yang berbatu dan kering dengan kemiringan tanah mencapai 40° , dengan ketinggian ± 100 m di atas permukaan laut. Jenis tanahnya yaitu tanah kambisol, podzolik, dan sebagian besar berupa tanah litosol. Jenis tanah litosol mempunyai sifat tahan terhadap erosi, mudah menyerap air dan dapat menahan tanah dengan baik (Awat, 2007: 40). *Naskah Kakawin Nagarakretagama* (1365) yang ditulis Mpu Prapanca menyebut nama Buton sebagai salah satu negeri yang telah berhubungan dengan Kerajaan Majapahit dan berada di bawah pengaruhnya (Slametmulyana, 1979: 280). Kesultanan Buton bila ditinjau dari letaknya yang berada di tengah-tengah lautan serta posisi Kraton yang berada di tepi garis pantai menunjukkan bahwa kesultanan ini bercorak maritim. Daerah kekuasaan yang tergabung dalam Kesultanan Buton tidak hanya mencakup Pulau Buton tetapi pulau-pulau lain, seperti Muna, Kabaena, Tikula, Tobea Besar, Tobea Kecil, Mangkasar, Bataoga, Kadatuwang, Masirieng, Siompo, dan Kepulauan Tukang Besi.



Gambar 2. Lansekap di sekitar Benteng Keraton Buton
(Sumber: Dokumentasi Mujabuddawat 2011)



Gambar 3. Lansekap topografi daratan Buton
(Sumber: Dokumentasi Mujabuddawat 2011)

Secara umum lokasi Pulau Buton dan pulau-pulau lain yang menjadi daerah kekuasaan Kesultanan Buton cukup strategis, namun pulau-pulau tersebut tidak subur. Jenis tanaman yang dapat tumbuh adalah jagung dan umbi-umbian, karena itulah, komoditi yang diperdagangkan dari hasil kekayaan buton adalah budak sedangkan hasil bumi hampir tidak ada. Bahkan untuk kebutuhan beras harus dibantu oleh VOC yang diimpor dari Maluku. Kesultanan Buton merupakan kesultanan bercorak maritim yang terdiri atas banyak pulau, ragam suku dan bahasa. Wilayah Kesultanan Buton berada di tengah-tengah kekuatan besar, yaitu Makassar, Ternate, dan Belanda. Pelabuhan Buton merupakan pelabuhan yang sangat penting pada masa itu. Akses laut yang terbentang di nusantara menjadikan Pelabuhan Buton menjadi pelabuhan yang sangat penting disinggahi.

2. Tinjauan Environmental Determinism Model terhadap Struktur Masyarakat dan Kesultanan

Environmental determinism atau *environmentalism* merupakan teori utama mengenai interaksi antara budaya dan lingkungan, teori ini telah ada sejak masa klasik Yunani. Gagasan ini pada dasarnya menerangkan bahwa mekanisme lingkungan menentukan bagaimana budaya beradaptasi (Sutton & Anderson, 2010: 15). Manusia sebagai subjek penghasil budaya sejatinya beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, proses adaptasi tersebut lalu menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang terus berlangsung turun-temurun hingga

memunculkan inovasi dan ciri khas yaitu budaya. Lingkunganlah yang memaksa proses adaptasi manusia untuk menyesuaikan diri agar bertahan hidup. Lingkungan yang dimaksud mencakup kondisi geografis, sumber daya alam, dan iklim.

Pada hal ini, ditinjau dari *environmental determinism model*, kondisi wilayah Kesultanan yang terbentang banyak pulau, maka Kesultanan Buton memiliki banyak suku dan etnis. Karena kondisi geografis Kesultanan Buton yang terpisah antar pulau, maka setiap pulau didiami oleh suku-suku yang berbeda. Pada kondisi masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton cukup beragam dan berasal dari berbagai suku bangsa yang berada di sekitar Sulawesi. Buton yang mendiami Pulau Buton, suku Muna yang mendiami Pulau Muna, suku kabaena di Pulau Kabaena, dan suku yang mendiami Kepulauan Tukang Besi. Selain itu terdapat suku laut yang disebut Orang Bajo. Orang Bajo adalah suku pengembara laut yang pemukimannya tersebar hampir di sepanjang garis pantai Pulau Sulawesi, bahkan termasuk Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Filipina. Pada kawasan Kesultanan Buton, Orang Bajo mendiami pantai di Pulau Buton, Kabaena, Poleang, Muna timur, Kepulauan Tukang Besi, Kaledupa, dan Kepulauan Tiworo. Secara historis, orang-orang Bajo memiliki peranan yang cukup signifikan dalam Kesultanan tersebut, sehingga mempunyai keistimewaan tersendiri. Terbukti pada tinggalan arkeologis, yaitu pada dua belas Terdapat suku pintu gerbang Benteng Kraton Buton terdapat satu pintu gerbang yang disebut dengan *Lamana Wajo*. Penamaan pintu tersebut dimaksudkan untuk menandai orang yang menjaga pintu tersebut atau pintu bagi keluar masuknya Orang Bajo yang ingin menghadap Sultan (Zuhdi, 2010: 44).

Untuk mengikat semua perbedaan suku di banyak pulau tersebut, maka dalam *environmental determinism model* menurut Sutton & Anderson, kondisi masyarakat yang terbentuk akibat lingkungan tersebut apabila tergabung dalam satu kesatuan yang dalam hal



Gambar 4. Lansekap daratan pesisir Buton
(Sumber: Dokumentasi Mujabuddawat 2011)

ini adalah Kesultanan Buton, maka perlu suatu bentuk *decision making* untuk melegitimasi kekuasaan (Sutton & Anderson, 2010: 125). Dalam kasus Kesultanan Buton, legitimasi kekuasaan yang paling efektif ialah dengan membentuk struktur lapisan sosial. Lapisan sosial dalam masyarakat Buton terbentuk berdasarkan mitos yang terbangun dalam masyarakat tentang asal-usul masyarakat Buton. Menurut mitos, asal-usul terbentuknya Kesultanan Buton berasal dari mendaratnya Sipanjonga beserta pengikutnya di Buton. Kemudian mereka membuka lahan di semak belukar yang disebut *Welia* atau Wolio atau Buton. Kemudian Sipanjonga menikah dengan saudara perempuan Simalui lalu melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Betoambari. Beranjak dari mitos ini diyakini akhirnya membelah lapisan sosial yang ada menjadi dua, yaitu Kaomu dan Walaka. Pelapisan ini berdasarkan antara kelompok orang yang menyebut sebagai orang Wolio dan bukan (Zuhdi, 2010: 74-77).

Mitos menjadi dasar hukum bagi golongan Kaomu untuk terus mempertahankan legitimasinya menjadi Sultan Buton. Sistem pemilihan seperti ini adalah pemilihan terbatas hanya dari golongan Kaomu. Laki-laki Kaomu tidak boleh menikah dengan perempuan Walaka karena dikhawatirkan akan terjadi penurunan status. Perbedaan lapisan masyarakat di Keraton Buton hingga kini masih ada, meskipun tidak terlembagakan lagi oleh adat. Perbedaan ini terlihat pada saat acara lamaran atau tunangan. Seorang laki-laki dari dua golongan di atas (Kaomu dan Walaka) dapat kawin dengan seorang perempuan dari lapisan yang lebih rendah,

namun tidak sebaliknya untuk perempuan. Seandainya seorang perempuan dari lapisan Kaomu atau Walaka melanggar peraturan ini, ia dapat dikucilkan oleh keluarganya dan tidak boleh tinggal di dalam Keraton, akan tetapi di masa Kesultanan ia akan dihukum mati (Schoorl, 2003: 81).

Selain lapisan sosial kalangan atas yaitu Kaomu dan Walaka yang saling membagi kekuasaan pemerintahan, terdapat pula lapisan sosial lain di bawahnya. Lapisan sosial tersebut yaitu Papara dan Batua. Golongan Papara, terdiri atas penduduk desa yang merdeka, mendiami daerah Kadie (desa). Mereka tidak boleh tinggal di pusat (Keraton Buton) dan tidak ikut dalam pemerintahan Kesultanan. Namun, mereka wajib menyerahkan upeti atau membayar pajak tahunan kepada Kesultanan dan mengerjakan jasa-jasa tertentu, antara lain membela negeri. Golongan Batua (budak) yang bekerja untuk golongan Kaomu dan Walaka (Schrool, 2003: 138).

Pada saat ini, di Buton terdapat beberapa pengelompokan masyarakat. Sebagai contoh, akan dikemukakan tiga pengelompokan yang didasarkan pada letak geografis dan bahasa yang digunakan. Pengkategorian meliputi Buton Daratan, yaitu masyarakat yang berdomisili di Kota Bau-Bau atau di pusat kekuasaan (Keraton). Buton Kepulauan, yaitu masyarakat yang mendiami Kepulauan Tukang Besi. Buton Pesisir, yaitu masyarakat yang menghuni wilayah pesisir di bagian selatan Pulau Muna. Berdasarkan pengelompokan ini, ketiganya bahkan hampir keseluruhan pengkategorian etnis dan bahasa di Buton memiliki bahasa yang berbeda dan tidak dapat saling mengerti pembicaraan masing-masing. Kelompok pengguna bahasa perlu dipertimbangkan dalam kategori suku "Buton" ini. Terdapat pengguna Bahasa Kepulauan Tukang Besi (kepulauan yang sekarang menjadi Kabupaten Wakatobi yang meliputi Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko), Bahasa Kabaena (di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bombana), dan Bahasa Muna (yang meliputi

wilayah Kecamatan Kapuntori, Barangka, dan sebagian Kecamatan Betoambari yaitu Desa Katobengke). Penggunaan Bahasa Muna terdapat di Kepulauan Muna Selatan atau biasa disebut Buton Utara yaitu di Kecamatan Lakudo, Gu, Mawasangka, dan Sangia Wambulu (Awat, 2007: 47).

Bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa berbeda dari rumpun yang sama dengan bahasa Wolio dan karenanya tidak saling mengerti. Pengguna-pengguna bahasa di setiap tempat di atas, juga tidak akan saling memahami bahasa satu sama lainnya. Oleh karena itu, seseorang yang mengaku orang Buton, sebagian besar tidak berbahasa Buton, tapi tergantung dari tempatnya tinggal atau berdomisili, serta bahasa ibunya. Hal ini tidak terlepas pula dari peranan Kesultanan Buton pada masa lalu dalam membentuk sebuah identitas ke-Buton-an, meskipun terdapat berbagai kelompok pengguna bahasa dengan rumpun yang beragam dalam kekuasaannya (Awat, 2007: 48). Pembentukan struktur sosial dalam masyarakat Kesultanan Buton terbukti efektif dalam melegitimasi kekuasaan bahkan pengaruhnya masih bertahan hingga saat ini. Lingkungan mendorong bentuk *decision making* yang efektif untuk menyatukan sebuah wilayah Kesultanan yang terbentang luas antar pulau. Kesultanan Buton berhasil membentuk karakter identitas ke-Buton-an pada masyarakatnya walaupun berbeda etnis, suku, dan bahasa.

3. Tinjauan Environmental Determinism Model terhadap Jaringan Perdagangan

Buton, seperti yang telah dijelaskan di atas bukanlah sebuah kawasan Kepulauan yang subur untuk menghasilkan komoditi hasil bumi. Komoditas perdagangan di kawasan ini adalah budak. Telah banyak perahu-perahu Ambon berukuran 16-24 ton mendapatkan budak-budak, pisau besi, dan pedang dari kepulauan Banggai, Buton, dan Selayar (Roelofsz, 1962: 220). Akan tetapi, kawasan Buton merupakan kepulauan yang terletak di jalur yang cukup strategis dalam jalur perdagangan rempah-rempah. Ditinjau

dari *environmental determinism model*, kondisi fisik lingkungan tersebut menjadikan pelabuhan Baubau di Buton menjadi pelabuhan collecting points atau pusat pengumpul. Alasan mengapa dijadikannya Baubau sebagai pusat Kesultanan Buton menjadi pelabuhan *collecting points* antara lain, pelabuhan Baubau memiliki pelabuhan alam yang baik untuk kapal menepi, Baubau memiliki persediaan bahan pangan dan pasar lokal, Baubau memiliki tempat peristirahatan yang kaya, Baubau merupakan tempat perakitan barang-barang yang berasal dari *feeder points*, yaitu pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya, dan Baubau dekat dengan jalur pelayaran internasional (Zuhdi, 2010: 64). Dukungan angin musim yang bertiup dengan tepat dan baik membawa kemudahan dalam perjalanan menempuh rute Malaka – Borneo – Buton – Maluku. Hal ini senada dengan catatan perjalanan Tome Pires mengenai jalur pelayaran dari Malaka menuju Maluku:

“Our well-equipped ships will not linger in Ambonia; they must go on to the Moluccas, especially anyone who has been able to learn and investigate how to come from Portugal to the Moluccas in such a short time; anyone will be able, as is known, when his turn comes and if he works-anyone who is jealous that things should be accomplished in the service of the King our lord-to make the journey of the Moluccas not by way of the coast of Java, but by Singapore, and from Singapore to Borneo and from Borneo to the island of Buton (Butun).” (Cortesau, 1967: 220).



Gambar 5. Peta Jalur Niaga di Nusantara abad ke-17 & 18

(Sumber: *Map Extraction* peta dasar Badan Informasi Geospasial diolah oleh Mujabuddawat, 2015)

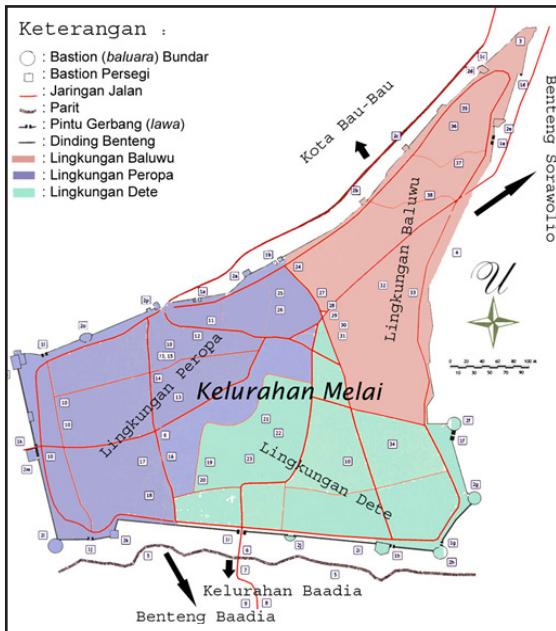
Disini terlihat fungsi Buton sebagai pelabuhan singgah dari jalur pelayaran Asia dan nusantara yang menuju Kepulauan Maluku.

Tradisi lokal juga menguraikan tentang perkembangan awal sejarah Buton di wilayah bagian timur Indonesia dalam rangka jaringan pelayaran. Lewat tradisi lisan diketahui adanya dua pelabuhan penting yaitu Batauga di bagian barat dan Kamaru di timur Pulau Buton. Kedua pelabuhan ini memainkan peranan sesuai dengan angin musim yang sedang bertiup (Zahari, 1977 dalam Awat, 2007: 61). Pelabuhan Batauga berperan pada musim angin timur dan sebaliknya pelabuhan Kamaru berperan pada musim angin barat. Batauga menghubungkan bagian barat Buton antara lain ke Muna dan Kabaena serta pulau-pulau kecil lainnya, sedangkan pelabuhan Kamaru melayani hubungan ke bagian timur antara lain ke Kepulauan Tukang Besi (Awat, 2007: 61).

4. Tinjauan Cultural Ecology Model terhadap Budaya Material Kesultanan Buton

Budaya sangat fleksibel dan selalu mengalir sebagai sebuah mekanisme yang adaptif, karena pola perilaku yang bereaksi terhadap kekuatan alam bisa diperoleh, ditularkan, dan dimodifikasi selama individu hidup (Henry, 1995: 1). Setiap individu terpaut pada suatu budaya yang spesifik, individu-individu dalam basis yang sama membentuk sebuah kelompok yang saling berbagi mempelajari dan menghasilkan pola perilaku yang unik, setiap budaya jelas merupakan hasil dari adaptasi ekologi. Bentuk *cultural ecology model* merupakan kelanjutan dari proses adaptasi, yaitu memodifikasi lingkungan dan menghasilkan suatu produk pola pikir masyarakat, budaya materi maupun non materi (Sutton & Anderson, 2010: 97).

Seperi yang telah diuraikan sebelumnya, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara pada masa kurun niaga merupakan suatu kondisi yang mendorong munculnya kerajaan-kerajaan baru di asia Tenggara, tidak terkecuali Buton.



Gambar 6. Pembagian Lingkungan di Kompleks Keraton Buton
(Sumber: Rustam Awat, 2007)

Konsep *entre-pot* merupakan gejala umum yang hadir di seluruh kerajaan di Asia Tenggara (Reid, 1992: 24). Dalam konsep ini menjadikan pelabuhan juga berfungsi sebagai pintu masuk Kerajaan. Sehingga kehadiran pelabuhan sangat penting sekali bagi keberlangsungan kerajaan tersebut. Ciri yang dapat dilihat adalah pembangunan Kraton atau Benteng-benteng yang umumnya dibangun dekat pelabuhan. Karena itulah tepat kiranya bila Anthony Reid mengatakan *port-polity* merupakan gejala umum yang ada di Asia Tenggara.

Ditinjau dari *cultural ecology model*, keraton dan benteng merupakan produk budaya material. Contoh budaya materi di dalam



Gambar 7. Masjid Keraton Buton sebagai bentuk tinggalan budaya material
(Sumber: Dokumentasi Mujabuddawat 2011)

Kesultanan Buton ialah Benteng Keraton Buton atau Benteng Wolio. Benteng Keraton Buton dibangun sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17 oleh masyarakat Buton, pada masa pemerintahan Sultan Buton IV, Sultan La Elangi yang bergelar *Dayanu Iksanuddin* (1597-1631 M). Benteng ini kemudian diselesaikan pada masa pemerintahan Sultan Buton VI, Sultan La Buke yang bergelar *Gafur Wadudu* (1632-1645 M). Pada masa lalu, di dalam benteng inilah pusat kegiatan pemerintahan dan pusat seluruh aktivitas kesultanan (Awat, 2007: 71).



Gambar 8. Pemandangan laut dari Benteng Keraton Buton
(Sumber: Dokumentasi Mujabuddawat 2011)

Hasil adaptasi dari bentukan geografis Kota Baubau yang berbukit dan berbatu, Benteng Keraton Buton terletak di atas bukit, terbuat dari batu karang yang dispasi dengan kapur sebagai bahan perekat. Benteng ini panjangnya 2.740 meter dengan tebal 1-2 meter dengan ketinggian antara 2-8 meter. Bentuk benteng tidak seperti benteng pada umumnya, akan tetapi mengikuti bentang lahan sehingga bentuknya menyerupai huruf "Dal" dalam aksara Arab (Awat, 2007: 66). Pembuatan benteng dilakukan dengan memecahkan batu-batu karang sehingga berukuran kecil. Batu-batu yang telah dipecah disusun secara sederhana, tanpa proses penghalusan sehingga bagian permukaannya terlihat kasar. Adanya perbedaan tinggi rendah pada dinding benteng bagian luar disebabkan bentang lahan yang tidak rata sehingga dinding benteng yang berada di dekat lembah dibuat lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tanahnya rata. Oleh karena itu, jika bagian dalam benteng dilihat dari permukaan maka akan memberi kesan rata.

Lokasi benteng yang berdiri di atas bukit dan menghadap ke laut merupakan sebuah bentuk adaptasi lingkungan terhadap keuntungan ekonomi dan politis. Benteng keraton Buton yang kokoh di atas bukit menghadap ke laut menjadi sebuah bentuk pertahanan yang sempurna, dengan begitu dapat memudahkan pengawasan pelabuhan dari benteng, memantau pergerakan kapal yang masuk dan keluar. Kompleks Keraton yang menjadi pusat Kesultanan Buton berada dalam benteng, sehingga pusat pemerintahan berada di dalam lingkungan pertahanan yang sangat kuat. Terdapat meriam sejumlah 52 buah yang sebagian besar diletakkan di dalam bastion (Awat, 2007: 85). Moncong meriam diarahkan ke laut dan ke lembah untuk menghalau musuh di luar benteng menjadikan benteng Keraton Buton merupakan tempat pertahanan yang paling kuat dan strategis pada masa jayanya.

5. Tinjauan Cultural Ecology Model terhadap Hegemoni Kesultanan Buton

Berdasarkan tinjauan *cultural ecology model*, kondisi lingkungan geografis turut mempengaruhi dalam proses pembentukan *decision making* terhadap aspek politis (Sutton & Anderson, 2010: 91). Kesultanan Buton berada di dalam lingkungan peta hegemoni yang saling ingin menguasai. Secara geopolitik jalur pelayaran niaga, Kesultanan Buton berada di tengah-tengah pengaruh kekuatan besar yaitu Makassar, Ternate, dan Belanda. Makassar sangat gigih dalam menegakkan supremasinya di Buton, untuk melawan pengaruh Ternate dan kemudian Belanda, adalah bagian dari upaya untuk mendominasi rute rempah-rempah (Reid, 2004: 156). Masuknya Buton dalam jalur pelayaran di Nusantara karena Buton berada pada posisi yang sangat strategis dengan pelabuhan yang baik dan merupakan penghubung antara pelayaran dari Makassar ke Maluku, atau sebaliknya. Oleh karena itu, pihak Belanda sangat bernafsu untuk mendapatkan calon-calon penentang Makassar terutama daerah-daerah di titik strategis ini, namun hanya

Buton yang dapat ditaklukkan pada tahun 1626 dan 1655 (Reid, 2004: 189). Setelah itu, pada tahun 1667, Belanda berkoalisi dengan pasukan Ambon dan pasukan Bugis dari Arung Palakka untuk mengalahkan sebuah armada Makassar yang sedang menyerang Buton (Reid, 1999: 371).

Dalam hubungan jaringan pelayaran ini, Buton dalam posisi terjepit di antara Ternate dan Makassar yang berkepentingan untuk merebut wilayahnya. Oleh karena itu, Buton kemudian bersekutu dengan Belanda dan membuat perjanjian kerjasama antara Sultan Buton IV La Elangi (Dayanu Iksanuddin) dengan Apollonius Scotte (mewakili gubernur Belanda) pada 5 Januari 1613. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Buton meminta perlindungan keamanan dari gangguan Makassar dan Ternate, sedangkan Belanda akan diberi hak-hak istimewa di Buton yaitu bebas berdagang tanpa dipungut upeti (bea). Selain itu, Sultan tidak akan mengizinkan bangsa lain berdagang atau berlalu lalang, jika hal itu merugikan orang-orang Belanda (Schoorl, 2003: 18-20). Pola sekutu ini tidak berlangsung terus menerus, namun tergantung kepentingan kedua belah pihak, jika muncul konflik maka pola sekutu berubah menjadi pola seteru (Zuhdi, 1999 dalam Schoorl, 2003: 19).

Hubungan tersebut terlihat dari banyaknya naskah perjanjian antara Sultan Buton dan pihak Belanda. Pihak Belanda menjamin memberi jaminan bahwa orang-orang Belanda akan membantu melindungi negeri serta warga Buton dari serbuan musuh, Belanda akan mengirimkan lebih banyak perlengkapan senjata dan sebuah kapal, Belanda akan menjadi penengah pada Raja Makassar, agar meniadakan permusuhan dengan Buton, dan mendesak Raja Ternate agar warganya tidak menimbulkan kesusahan bagi Raja Buton dan warganya. Proses adaptasi dari *cultural ecology model*, membentuk *decision making* politik yang diterapkan Kesultanan Buton menjadi salah satu kunci sukses dari strategi ‘menaklukan’ lingkungan. Tidak hanya menarik keuntungan

maksimal dari lingkungan alam, geografis, namun lingkungan geopolitik yang membawa kejayaan Kesultanan Buton berjaya hingga abad ke-20.

KESIMPULAN

Dalam konteks Kesultanan Buton pada abad ke-17 dan 18, pada masa itu Kesultanan Buton merupakan kawasan penting dalam jalur perlayaran dan perdagangan. Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas, kawasan Buton diuntungkan oleh keletakkannya yang strategis dan didukung oleh angin musim yang baik. Ditinjau dari *environmental determinism model*, kawasan Kesultanan Buton yang mencakup pulau-pulau lain di sekitarnya tentu menentukan ciri dari kebudayaannya. Karena terpisah atas pulau-pulau, maka secara budaya dan sosial masyarakatnya terbagi atas keragaman suku dan bahasa yang berbeda antar pulau. Dalam menjaga eksistensi kekuasaannya, Kesultanan Buton membentuk lapisan sosial yang masing-masing memiliki tugas dan peran yang dipegang teguh. Bentuk pemerintahan dan kekuasaan Kesultanan Buton diturunkan secara turun temurun sehingga Kesultanan Buton sukses mempertahankan legitimasinya selama berabad-abad.

Ditinjau dari *cultural ecology model*, karena pengaruh lingkungan yang berada di dalam lingkup kepulauan, maka ciri dari Kesultanan Buton ialah budaya maritim. Terbukti dari adanya situs arkeologis Benteng Kraton Wolio di Baubau, Buton. Benteng ini tercatat dalam Guiness Book of Record sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,3 hektar. Benteng ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Buton yang berdiri pada abad ke-16. Benteng ini berdiri di atas bukit sehingga dahulu benteng ini merupakan tempat pertahanan terbaik karena dari atas Benteng dapat melihat lautan membentang di bawah bukit. Kesultanan Buton yang memiliki budaya maritim akan memanfaatkan keuntungan dari letak geografis dan lingkungannya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Maka dari itu, Kesultanan mendirikan pelabuhan-pelabuhan

di setiap bagian kekuasaannya menjadi pelabuhan *feeder points* dan pelabuhan Baubau yang dekat dengan pusat Kesultanan dijadikan sebagai pelabuhan *collecting points*.

Keberadaan Kesultanan Buton di perairan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tidak dapat dipisahkan dari adanya dua faktor, yaitu kondisi lingkungan geografis dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitarnya. Kawasan Buton diuntungkan dengan kondisi pulau sekitar yang tidak terlalu banyak dan rapat sehingga menjadi pilihan banyak pelaut untuk memasuki Selat Buton. Kemudian perairan yang terlindung dari angin keras karena telah terlindung dari pulau-pulau di sekitarnya. Faktor lain adalah keberadaan pelabuhan-pelabuhan yang didirikan di sekitar Buton. Sebelah barat Buton terdapat pelabuhan Makassar yang mulai maju pesat setelah jatuhnya Malaka ke tangan VOC di tahun 1511. Selain itu di timur terdapat Kepulauan Maluku yang menjadi lumbung rempah-rempah bagi VOC membuat banyak kapal-kapal Eropa melewati jalur tersebut. Karena faktor-faktor keuntungan itulah kawasan perairan Buton memiliki peran yang sangat strategis dalam jaringan perdagangan internasional. Kejayaan Kesultanan Buton yang panjang menjadikan wilayahnya yang terdiri dari banyak pulau, beragam etnis dan bahasa memiliki identitas ke-Buton-an yang melekat hingga saat ini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Panitia kegiatan Arung Sejarah Bahari VI, Direktorat Jenderal Geografi Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Pariwisata 2011. Berkat kegiatan tersebut penulis berkesempatan mengunjungi banyak lokasi dan situs bersejarah di Sulawesi Tenggara sehingga dapat memperoleh data yang membantu dalam penyusunan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Gaya Mentari, S. Hum. yang telah membantu dalam memperoleh sumber referensi terkait arkeologi ekologi, serta Wuri Handoko, S.S. yang juga banyak memberikan sumber-sumber referensi yang menjadi acuan

dalam menyusun tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Awat, Rustam. (2007). *Alternatif Pengembangan Sumber Daya Budaya di Keraton Buton Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Tesis Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Butzer, Karl W. (1994). *Archaeology as Human Ecology Method and Theory for a Contextual Approach*. New York: Cambridge University Press.
- Cortesau, Armando. (1994). *The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues*. London: Robert Maclehouse and Co. Ltd.
- Henry, Donald O. (1995). *Prehistoric Cultural Ecology and Evolution: Insights from Southern Jordan*. New York: Plenum Press.
- Hutagalung, R. A. (2010). *Ekologi Dasar*. Jakarta.
- Lapian, A. B. (2009). *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Poelinggomang, L., Edward. (2002). *Makassar Abad XIX*. Jakarta: KPG.
- Reid, Anthony. (1992). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (1999). *Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680*. Jilid II. Diterjemahkan oleh R. Z. Leirissa dan P. Soemitro (ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (2004). *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*. Diterjemahkan oleh Sori Siregar, dkk. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Roelofsz, Meilink. (1962). *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Schoorl, Pim. (2003). *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*. Jakarta: Penerbit Jambatan Bekerjasama dengan Perwakilan KITLV Jakarta.
- Slametmulyana. (1979). *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sopher, David E. (1967). *Geography of Religions*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Sutton, Mark Q. & Anderson, E.N. 2010. *Introduction to Cultural Ecology*. Plymouth: AltaMira Press.
- Taylor, Sue, et.al. (1972). Nutritional Ecology, A New Perspective. *Lambda Alpha Journal of Man*, 4(1).
- Tjandrasasmita, Uka. (2009). *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: KPG.
- Todum, Howard. (1992). *Ekologi Sistem - Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Van Leur, J. C. (1957). *Indonesia Trade and Society*. The Hague: Nijhoff.
- Zuhdi, Susanto. (2010). *Sejarah Buton yang Terabaikan Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada